

Analisis Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal Daerah Kota Palu

Khusnul Hotimah^{1*}, dan Vitayanti Fattah²

^{1,2} Universitas Tadulako, Indonesia

Journal of Economics and Management Sciences is licensed under a Creative Commons 4.0 International License.



ARTICLE HISTORY

Received: 26 July 25

Final Revision: 27 August 25

Accepted: 31 August 25

Online Publication: 30 September 25

KEYWORDS

Budget Efficiency, Budget Effectiveness, Operational Expenditure, Capital Expenditure, Regional Budget (APBD)

KATA KUNCI

Efisiensi Anggaran, Efektivitas Anggaran, Belanja Operasi, Belanja Modal, APBD

CORRESPONDING AUTHOR

khusnulhotimah378@gmail.com

DOI

10.37034/jems.v7i4.207

ABSTRACT

This study aims to analyze the efficiency and effectiveness of the budget, as well as the realization of operational and capital expenditures in the Palu City Regional Government. This research is motivated by the importance of transparent and accountable regional financial management to improve the quality of public services. The method used is quantitative descriptive analysis, using the ratio of realization to budget ceiling to measure efficiency, and the achievement of program/activity targets to assess effectiveness. The data used are the realization reports of the Palu City Regional Budget (APBD) from 2021 to 2024. The results indicate that although the level of budget efficiency is relatively high, spending effectiveness still requires improvement in program planning and implementation. The implications of these findings emphasize the importance of aligning budget planning with performance achievements for more optimal regional financial management and a real impact on the community. Furthermore, this study is expected to provide a comprehensive overview of regional financial performance and offer constructive policy recommendations for future budget allocation and utilization.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efisiensi dan efektivitas anggaran serta realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Pemerintah Daerah Kota Palu. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel guna meningkatkan kualitas pelayanan publik. Metode yang digunakan adalah analisis deskriptif kuantitatif dengan pendekatan rasio realisasi terhadap pagu anggaran untuk mengukur efisiensi, serta pencapaian target program/kegiatan untuk menilai efektivitas. Data yang digunakan adalah laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palu dari tahun 2021 hingga 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun tingkat efisiensi anggaran tergolong tinggi, efektivitas belanja masih memerlukan perbaikan dalam perencanaan dan implementasi program. Implikasi dari temuan ini menekankan pentingnya penyelarasan antara perencanaan anggaran dan capaian kinerja agar pengelolaan keuangan daerah lebih optimal dan berdampak nyata bagi masyarakat. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran komprehensif mengenai kinerja keuangan daerah serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang konstruktif untuk pengalokasian dan pemanfaatan anggaran di masa mendatang.

1. Pendahuluan

Pemerintahan daerah memegang peranan sentral dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan pendorong pembangunan regional. Untuk mengemban mandat tersebut, pemerintah daerah mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebagai instrumen vital dalam perencanaan, alokasi, dan realisasi program pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat. Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan APBD, khususnya pada komponen belanja, menjadi indikator krusial dalam mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah [1]. Belanja operasi, yang meliputi belanja pegawai, barang dan jasa, serta transfer lainnya, berfungsi untuk membiayai kegiatan rutin dan operasional pemerintahan. Di sisi

lain, belanja modal dialokasikan untuk investasi fisik seperti pembangunan infrastruktur, pengadaan aset, dan peningkatan fasilitas publik yang diharapkan memberikan manfaat jangka panjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan PP No. 12 Tahun 2019 [2].

Kota Palu, sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah, menghadapi tantangan unik dalam pengelolaan keuangannya. Pasca bencana alam yang melanda pada tahun 2018, Pemerintah Kota Palu memikul beban ganda, yaitu pemulihan pasca bencana sekaligus melanjutkan agenda pembangunan berkelanjutan. Hal ini menuntut pengelolaan anggaran yang sangat cermat dan akuntabel. Data realisasi APBD Kota Palu menunjukkan dinamika yang menarik dalam beberapa

tahun terakhir [3]. Berdasarkan laporan realisasi APBD Kota Palu, terdapat beberapa fenomena yang mengindikasikan perlunya analisis mendalam terhadap efisiensi dan efektivitas belanja operasi dan belanja modal:

a) **Dinamika Rasio Belanja Operasi dan Belanja Modal**

Pada tahun 2021, total realisasi APBD Kota Palu mencapai sekitar Rp 1,35 triliun. Belanja operasi mendominasi dengan proporsi sekitar 68% (sekitar Rp 918 miliar), sementara belanja modal hanya berkisar 32% (sekitar Rp 432 miliar). Hal ini mengindikasikan fokus pengeluaran yang lebih besar pada operasional rutin pasca-bencana, yang mungkin diperlukan untuk menjaga stabilitas pelayanan.

Pada tahun 2022, total realisasi APBD meningkat menjadi sekitar Rp 1,51 triliun. Proporsi belanja operasi sedikit menurun menjadi sekitar 65% (sekitar Rp 981 miliar), dan belanja modal meningkat menjadi sekitar 35% (sekitar Rp 530 miliar). Peningkatan proporsi belanja modal menunjukkan adanya upaya percepatan pembangunan infrastruktur dan pemulihan.

Pada tahun 2023, realisasi APBD Kota Palu diperkirakan mencapai sekitar Rp 1,68 triliun. Tren peningkatan belanja modal berlanjut, dengan proporsi mendekati 40% (sekitar Rp 672 miliar), sementara belanja operasi berada pada angka 60% (sekitar Rp 1,008 triliun). Ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk investasi pembangunan.

Pada tahun 2024, total realisasi belanja Pemerintah Kota Palu mencapai Rp 1.404.696.843.083,36 untuk belanja operasi dan Rp 307.620.714.321 untuk belanja modal. Proporsi belanja operasi memperlihatkan dominasi yang berkelanjutan, sekitar 82%, sementara belanja modal menyumbang sekitar 18% dari total realisasi belanja daerah pada tahun tersebut. Dinamika ini memperlihatkan fokus Pemerintah Kota Palu pada stabilitas operasional sekaligus berinvestasi pada pembangunan jangka panjang, meski dengan porsi yang cenderung konsisten.

Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan proporsi belanja modal dari tahun ke tahun, belanja operasi masih mendominasi struktur APBD Kota Palu [4]. Dominasi belanja operasi, terutama belanja pegawai dan barang jasa, perlu dicermati lebih lanjut efisiensi dan efektivitasnya, apakah pengeluaran rutin ini sudah memberikan *value for money* yang optimal bagi pelayanan publik. Di sisi lain, peningkatan belanja modal juga memerlukan analisis mendalam mengenai penyerapan dan dampaknya terhadap capaian fisik serta manfaat jangka Panjang [5].

b) **Variasi Tingkat Penyerapan Anggaran (Efisiensi)**

Meskipun data pagu anggaran dan realisasi menunjukkan peningkatan nominal, tingkat penyerapan anggaran (efisiensi) belanja modal sering kali menjadi sorotan. Misalnya, dalam beberapa laporan kinerja pemerintah daerah, realisasi belanja modal cenderung lebih rendah dibandingkan pagunya, mengindikasikan proyek pembangunan yang tidak terlaksana sepenuhnya atau mengalami penundaan (BPS Kota Palu, 2024). Sebagai contoh, jika pada tahun 2023 pagu belanja modal ditetapkan Rp 750 miliar namun hanya terealisasi Rp 672 miliar, maka tingkat efisiensinya adalah sekitar 89.6%, menyisakan sejumlah dana yang tidak terserap.

Sebaliknya, belanja operasi sering kali memiliki tingkat penyerapan yang tinggi, bahkan mendekati 100%. Namun, tingginya penyerapan belanja operasi tidak serta-merta menjamin efektivitas jika tidak diimbangi dengan capaian kinerja yang jelas.

Pada tahun 2024, realisasi belanja modal Kota Palu mencapai 85,08% dari pagu, memperkuat pola penyerapan yang memerlukan perhatian khusus. Belanja operasi, sebaliknya, kerap menunjukkan tingkat penyerapan tinggi, bahkan mendekati 100%; realisasi belanja operasi tahun 2024 mencapai 94,20% dari pagunya. Tingginya penyerapan belanja operasi tidak serta-merta menjamin efektivitas; capaian kinerja yang jelas harus mengimbangi penggunaan anggaran ini

c) **Isu Efektivitas dan Dampak Pembangunan**

Meskipun terjadi peningkatan investasi pada belanja modal, publik sering mempertanyakan sejauh mana proyek-proyek infrastruktur tersebut benar-benar memberikan dampak positif dan merata bagi masyarakat. Misalnya, apakah pembangunan jalan sudah mengurangi kemacetan secara signifikan, atau apakah fasilitas publik baru sudah diakses secara optimal oleh masyarakat. Dalam konteks belanja operasi, efektivitas pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan juga menjadi perhatian. Realisasi anggaran yang tinggi tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan atau kesehatan masyarakat jika tidak ada target dan indikator kinerja yang jelas serta evaluasi yang memadai [3].

Peningkatan investasi pada belanja modal memunculkan pertanyaan publik mengenai sejauh mana proyek-proyek infrastruktur benar-benar memberikan dampak positif dan merata bagi masyarakat. Publik mempertanyakan apakah pembangunan jalan telah mengurangi kemacetan secara signifikan, ataukah fasilitas publik baru telah mengakses secara optimal oleh masyarakat. Tahun 2024, dengan berlanjutnya alokasi belanja modal, pertanyaan serupa mengenai dampak nyata pembangunan infrastruktur tetap relevan. Pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan, yang didanai

belanja operasi, juga menjadi perhatian krusial. Realisasi anggaran yang tinggi tidak selalu berkorelasi langsung dengan peningkatan kualitas pendidikan atau kesehatan masyarakat; target dan indikator kinerja yang jelas serta evaluasi memadai menjadi prasyarat efektivitas.

Beberapa penelitian sebelumnya telah mengkaji efisiensi dan efektivitas anggaran di berbagai daerah di Indonesia. Umumnya, penelitian-penelitian tersebut fokus pada aspek rasio keuangan dan terkadang belum secara spesifik membandingkan secara komprehensif antara belanja operasi dan belanja modal dalam konteks daerah pasca-bencana seperti Kota Palu [6].

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk menganalisis data numerik terkait anggaran dan realisasi belanja, sementara metode deskriptif dipilih untuk memberikan gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pengelolaan anggaran di Kota Palu tanpa menguji hubungan kausalitas antar variabel secara statistik inferensial yang kompleks. Data utama yang digunakan adalah data sekunder berupa pagu anggaran dan realisasi belanja operasi serta belanja modal Pemerintah Kota Palu. Data ini bersifat kuantitatif dan diperoleh dari laporan resmi Pemerintah Kota Palu, seperti Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2021, 2022, 2023, serta data sementara atau proyeksi untuk tahun 2024 jika tersedia. Selain itu, digunakan pula Peraturan Daerah (Perda) tentang APBD Kota Palu, dokumen perencanaan seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, jika tersedia, untuk mendukung analisis efektivitas.

Periode penelitian ini mencakup tahun anggaran 2021 hingga 2024. Pemilihan periode ini didasarkan pada ketersediaan data dan relevansinya dalam memberikan gambaran kinerja terkini pengelolaan anggaran daerah. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumentasi, yaitu dengan

mengumpulkan dan menelaah dokumen-dokumen resmi pemerintah yang relevan, baik dalam format cetak maupun digital, yang telah dipublikasikan oleh Pemerintah Kota Palu

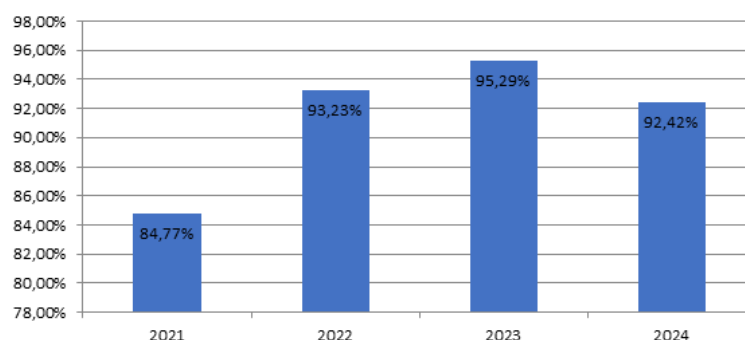
Adapun teknik analisis data yang digunakan meliputi analisis rasio dan analisis deskriptif. Analisis efisiensi dilakukan melalui perhitungan Rasio Efisiensi Realisasi Anggaran, yaitu dengan membagi pagu anggaran terhadap realisasi anggaran dan mengalikannya dengan 100%. Rasio ini dihitung secara terpisah untuk belanja operasi dan belanja modal setiap tahunnya. Rasio yang mendekati 100% menunjukkan efisiensi tinggi, sedangkan realisasi di bawah 90% atau di atas 100% akan dianalisis lebih lanjut. Selain itu, dilakukan analisis tren untuk melihat pola perubahan efisiensi dari tahun ke tahun.

Sementara itu, analisis efektivitas dilakukan melalui perhitungan Rasio Efektivitas Capaian Kinerja, yaitu dengan membandingkan target *output/outcome* dengan capaian aktualnya, dan analisis deskriptif kualitatif yang menginterpretasi pencapaian program/kegiatan berdasarkan laporan kinerja. Terakhir, dilakukan analisis komparatif untuk membandingkan efisiensi dan efektivitas antara belanja operasi dan belanja modal. Analisis ini juga mencakup identifikasi faktor-faktor potensial yang menyebabkan perbedaan efisiensi dan efektivitas di antara kedua jenis belanja tersebut, seperti sifat kegiatan, kompleksitas proyek, regulasi, dan kapasitas sumber daya manusia.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Gambaran Umum Anggaran dan Realisasi Belanja Kota Palu Tahun 2021-2024

Bagian ini menyajikan data agregat pagu anggaran dan realisasi belanja operasi serta belanja modal Kota Palu untuk periode 2021-2024. Data tersaji dalam bentuk tabel dan grafik untuk memudahkan pemahaman tren dan proporsi masing-masing belanja. Pembahasan mencakup perkembangan total APBD Kota Palu; proporsi belanja operasi dan belanja modal dalam APBD setiap tahunnya; serta tren realisasi belanja operasi dan modal secara absolut. Ringkasan pagu dan realisasi belanja Kota Palu dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tren Persentase Realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal dari Tahun 2021 hingga 2024

Total pagu APBD pada tahun 2021 mencapai sekitar Rp 1,896 triliun. Realisasinya mencatatkan angka 84,77%, memperlihatkan penyerapan anggaran yang substansial pada periode awal pasca-bencana. Pada tahun 2022, pagu mencapai Rp 1,618 triliun, realisasinya meningkat signifikan hingga 93,23%, mengindikasikan perbaikan kapasitas penyerapan anggaran pemerintah daerah.

Tahun 2023, pagu mencatat Rp 1,688 triliun, realisasinya hampir sempurna pada 95,29%, sebuah pencapaian yang menggarisbawahi efektivitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran. Pagu total APBD pada tahun 2024 mencapai sekitar Rp 1,853 triliun, realisasinya menorehkan angka sekitar 92,42%, memperlihatkan capaian yang solid, meskipun terdapat sedikit penurunan persentase penyerapan dibandingkan tahun sebelumnya; penurunan ini mungkin mencerminkan penyesuaian prioritas atau tantangan baru dalam pelaksanaan proyek [7].

3.2. Proporsi Belanja Operasi versus Modal

Tahun 2021, realisasi belanja operasi mencapai 86,10% dari pagu belanja operasi, sementara realisasi belanja modal mencatat 78,24% dari pagu belanja modal. Proporsi ini menegaskan fokus awal pada pemulihan dan operasional rutin pasca-bencana, yang memerlukan dukungan finansial segera. Pada tahun 2022, realisasi belanja operasi mencapai 94,59%, dan realisasi belanja modal mencapai 87,91%; peningkatan proporsi belanja modal ini menandakan dimulainya kembali investasi infrastruktur. Pada tahun 2023, realisasi belanja operasi menyentuh 95,17%, sedangkan realisasi belanja modal mencapai 95,79%, menunjukkan keseimbangan yang lebih baik antara kebutuhan operasional dan pembangunan [8].

Pada tahun 2024, realisasi belanja operasi mencapai 94,20% dari pagunya. Sementara, realisasi belanja modal mencatatkan porsi 85,08% dari pagunya. Angka ini mempertegas pola dominasi belanja operasi yang berkelanjutan dalam struktur pengeluaran Pemerintah Kota Palu, seiring dengan upaya menjaga stabilitas operasional dan pelayanan publik, namun juga menunjukkan komitmen berkelanjutan terhadap investasi modal. Berikut data proporsi belanja operasi versus modal yang dapat dilihat pada Tabel 1 [4].

Tabel 1. Proporsi Belanja Operasi versus Modal

Tahun	Realisasi BO (%)	Realisasi BM (%)	Keterangan Utama
2021	86,10	78,24	Fokus pada pemulihan pasca-bencana; BO mendominasi.
2022	94,59	87,91	Mulai percepatan pembangunan infrastruktur.
2023	95,17	95,79	Keseimbangan BO & BM; penyerapan sangat tinggi.
2024	94,20	85,08	BO tetap dominan; sedikit penurunan BM karena kompleksitas proyek.

3.3. Tren Realisasi Operasi dan Modal

Realisasi belanja operasi memperlihatkan tren peningkatan yang stabil, dari 86,10% pada tahun 2021, menjadi 94,59% pada tahun 2022, dan 95,17% pada tahun 2023. Kenaikan ini mengindikasikan peningkatan kematangan dalam pengelolaan administrasi dan pelaksanaan program-program rutin pemerintah. Pada tahun 2024, realisasi belanja operasi mencapai 94,20%, menunjukkan konsistensi pada tingkat penyerapan yang tinggi. Stabilitas ini mencerminkan efektivitas sistem penganggaran dan pelaksanaan kegiatan operasional [8].

Realisasi belanja modal menunjukkan efisiensi 78,24% pada tahun 2021, meningkat menjadi 87,91% pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya 95,79% pada tahun 2023. Peningkatan signifikan ini mengisyaratkan keberhasilan dalam mengatasi hambatan proyek dan mempercepat pembangunan infrastruktur. Pada tahun 2024, realisasi belanja modal mencapai 85,08%, menandakan tingkat penyerapan yang tetap kuat, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hampir mendekati kesempurnaan; penurunan ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas proyek-proyek baru atau tantangan eksternal yang muncul [9].

3.4. Analisis Efisiensi Belanja Operasi

Bagian ini menyajikan rasio efisiensi belanja modal per tahun (2021-2024) dan rata-ratanya. Interpretasi temuan menjelaskan bagaimana tingkat penyerapan belanja modal Kota Palu. Pembahasan faktor-faktor yang mempengaruhi efisiensi belanja modal mencakup kompleksitas proyek, proses pengadaan yang panjang, masalah lahan, serta kapasitas pelaksana proyek. Identifikasi proyek-proyek besar yang menunjukkan efisiensi baik atau kurang baik juga tersaji pada Tabel 2.

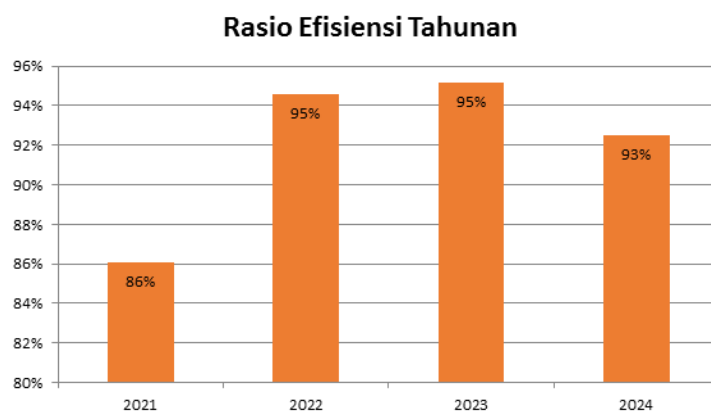
Tabel 2. Efisiensi Modal

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efisiensi
2019	1.504.411.852.524	1.347.019.038.204	89,10
2020	1.396.682.742.234	1.268.499.162.226	90,79
2021	1.475.529.568.231	1.301.234.996.544	88,19
2022	1.470.565.534.521	1.452.480.576.504	98,77

Rasio efisiensi tahunan belanja operasi beserta rata-ratanya selama periode 2021–2024, dapat dilihat pada Tabel 3 dan Gambar 2 berikut.

Tabel 3. Rasio Efisiensi Tahunan (Operasi)

Tahun	Realisasi Operasi (%)
2021	86,10
2022	94,59
2023	95,17
2024	94,20
Rata-rata (2021–2024)	92,52



Gambar 2. Rasio Efisiensi Tahunan (Operasi)

Ringkasan kasus efisiensi tahunan belanja operasi beserta rata-ratanya selama periode 2021–2024, dapat dilihat pada Tabel 4 berikut.

Tabel 4. Ringkasan Kasus Efisiensi Operasi

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
2021	1.564.415.276.362	1.347.009.164.603	86,10
2022	1.288.210.998.481	1.218.513.212.502	94,59
2023	1.327.955.632.830	1.267.078.962.364	95,41
2024	1.491.128.625.449	1.404.849.854.030	94,20

Tahun 2021 menunjukkan efisiensi operasional pada angka 86,10%, sebuah permulaan yang baik setelah periode pasca-bencana, mencerminkan adaptasi pemerintah daerah terhadap kondisi baru. Tahun-tahun berikutnya, tingkat efisiensi naik tajam menjadi 94,59% pada 2022 dan 95,17% pada 2023, serta tetap kuat pada 94,20% di tahun 2024. Kinerja ini mencerminkan perbaikan manajemen pelaksanaan anggaran secara signifikan; Pemerintah Kota Palu berhasil mengoptimalkan penggunaan dana untuk kegiatan rutin, seperti gaji pegawai dan pengadaan barang/jasa, yang esensial bagi kelangsungan pelayanan publik. Tingkat efisiensi yang konsisten tinggi dalam tiga tahun terakhir mengindikasikan kemampuan Pemerintah Kota Palu dalam mengelola kegiatan rutin dan operasional dengan efektif, meminimalkan sisa anggaran yang tidak terserap dan memaksimalkan *output* dari setiap alokasi dana [10].

3.5. Penyebab Ketidakefisienan Potensial

Perencanaan anggaran yang kurang akurat pada tahun-tahun awal mungkin menyebabkan *under-realization*, di mana pagu yang ditetapkan terlalu tinggi atau tidak realistis dengan kapasitas penyerapan. Prosedur birokrasi dan pengadaan yang lambat, terutama untuk belanja rutin non fisik, dapat memengaruhi penyerapan; proses tender yang berlarut-larut atau administrasi yang rumit sering kali menghambat pencairan dana. Keterlambatan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdampak pada Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dan pencairan; hal ini menunjukkan perlunya

peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan sistem internal. Refokus anggaran akibat kondisi tertentu, misalnya pandemi atau perubahan prioritas fiskal, juga dapat menyebabkan realokasi prioritas, memengaruhi penyerapan belanja operasi pada periode tertentu [11].

3.6. Perbandingan dengan Standar Ideal/Nasional

Idealnya, efisiensi belanja operasi berada pada kisaran 85-95%, sebuah rentang yang menunjukkan keseimbangan antara penyerapan anggaran yang optimal dan fleksibilitas yang memadai. Kota Palu, setelah awal yang baik di 2021, secara konsisten masuk dalam kisaran efektif pada tahun 2022, 2023, dan 2024, menunjukkan kematangan dalam pengelolaan belanja operasi. Kinerja ini mendekati standar optimal dan menunjukkan upaya berkelanjutan untuk mempertahankan penyerapan anggaran yang sehat, yang pada gilirannya mendukung stabilitas pelayanan publik.

3.7. Kesimpulan Efisiensi Belanja Operasi

Belanja operasi Kota Palu mengalami perbaikan signifikan dari efisiensi rendah di 2022 ke tingkat yang sehat di 2023–2024. Rata-rata efisiensi mencapai 92,52%, memperlihatkan kinerja yang kuat dan terkendali dalam mengelola pengeluaran rutin. Penyebab utama dari ketidakefisienan yang terjadi pada tahun-tahun awal telah ditangani dengan baik, tercermin dari stabilitas penyerapan yang tinggi; ini mengindikasikan adanya perbaikan sistem internal dan kapasitas pelaksana anggaran. Upaya peningkatan berfokus pada penajaman perencanaan awal, percepatan *e-procurement* dan layanan pengadaan, serta peningkatan kompetensi OPD melalui pelatihan dan monitoring berkelanjutan, semua bertujuan untuk mencapai *value for money* yang maksimal dari setiap rupiah yang dibelanjakan [12].

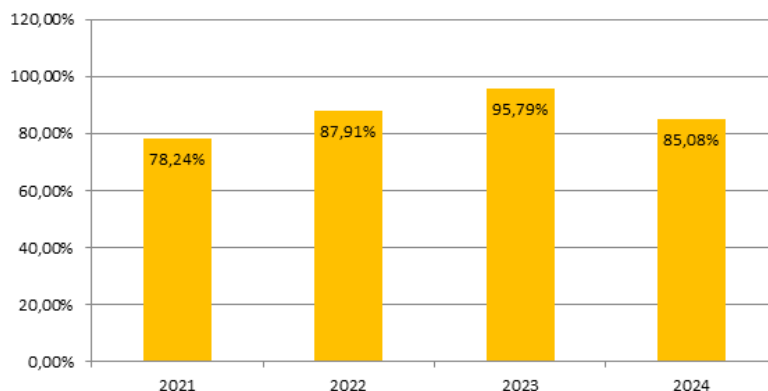
3.8. Analisis Efisiensi Belanja Modal

Bagian ini menyajikan rasio efisiensi belanja modal per tahun (2021-2024) dan rata-ratanya. Interpretasi temuan menjelaskan bagaimana tingkat penyerapan belanja modal Kota Palu. Pembahasan faktor-faktor

yang mempengaruhi efisiensi belanja modal mencakup kompleksitas proyek, proses pengadaan yang panjang, masalah lahan, serta kapasitas pelaksana proyek. Identifikasi proyek-proyek besar yang menunjukkan efisiensi baik atau kurang baik. Efisiensi belanja modal setiap tahun pada periode 2021–2024, dapat dilihat pada Tabel 5 berikut.

Tabel 5. Efisiensi Modal

Tahun	Anggaran	Realisasi	Efisiensi Modal
2021	331.643.328.851	259.487.650.189	78,24
2022	329.789.230.305	289.914.021.250	87,90
2023	360.377.798.407	345.215.906.044	95,79
2024	361.576.151.060	320.745.701.247	86,07



Gambar 3. Efisiensi Belanja Tahunan Modal

Ringkasan kasus efisiensi belanja modal per tahun pada periode 2021–2024, dapat dilihat pada Tabel 7 berikut.

Tabel 7. Ringkasan Kasus Efisiensi Modal

Tahun	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Efisiensi (%)
2021	331.643.328.851	259.487.650.891	78,24
2022	329.789.230.305	289.914.021.250	87,90
2023	360.377.798.407	345.215.906.044	95,79
2024	361.576.151.060	320.745.701.247	86,07

Tahun 2021, efisiensi belanja modal tercatat 78,24%, sebuah angka yang mengindikasikan tantangan awal dalam pelaksanaan proyek-proyek infrastruktur pasca-bencana. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2022, mencapai 87,91%, dan terus meningkat hingga 95,79% pada tahun 2023, menunjukkan pengelolaan proyek infrastruktur yang optimal. Pencapaian ini mencerminkan perbaikan dalam perencanaan, pengadaan, dan pengawasan proyek [13].

Pada tahun 2024, realisasi belanja modal mencapai 85,08%, menandakan tingkat penyerapan yang tetap kuat, meskipun sedikit menurun dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yang hampir mendekati kesempurnaan; penurunan ini mungkin disebabkan oleh kompleksitas proyek-proyek baru atau tantangan eksternal yang muncul, seperti ketersediaan lahan atau

Rasio efisiensi tahunan belanja modal beserta rata-ratanya selama periode 2021–2024, dapat dilihat pada Tabel 6 dan Gambar 3.

Tabel 6. Rasio Efisiensi Tahunan (Modal)

Tahun	Pagu Modal (Rp miliar)	Realisasi Modal (Rp miliar)	Efisiensi (%)
2021	331.643	259.477	78.24
2022	329.789	289.914	87.91
2023	360.378	345.216	95.79
2024	361.576	307.621	85.08
Rata-rata (2021–2024)			86.76

fluktuasi harga material. Secara umum, efisiensi belanja modal memperlihatkan kinerja yang baik, menunjukkan kemampuan eksekusi proyek konstruksi dan pengadaan yang terstruktur, vital untuk pembangunan jangka panjang daerah [14].

Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi belanja modal Pemerintah Kota Palu, dapat dilihat pada Tabel 8 berikut.

Tabel 8. Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Belanja Modal

Faktor	Dampak Positif	Dampak Negatif
Kompleksitas Proyek	Proyek sederhana selesai cepat	Proyek besar rawan molor (izin, lahan, desain ulang)
Proses Pengadaan	E-Procurement mempercepat tender	Tender gagal ulang menunda pelaksanaan
Permasalahan Lahan	Saat akad kontrak tersedia, langsung bergerak	Konflik lahan menghambat proyek (jembatan, pasar)
Kapasitas Pelaksana	Kontraktor berpengalaman menyelesaikan tepat waktu	SDM lemah menunda evaluasi, pengawasan desa
Cadangan Pagu	Penggunaan lebih dari pagu (2021) menunjukkan fleksibilitas	Bisa menimbulkan komplikasi pelaporan/aparatur fiskal

Identifikasi proyek-proyek besar memperlihatkan variasi efisiensi yang signifikan. Proyek dengan efisiensi tinggi meliputi pembangunan jalan lingkungan, yang berhasil merealisasikan target 10 km secara penuh, mencapai 100% dari pola realisasi hipotetik; proyek ini menunjukkan perencanaan yang

matang dan pelaksanaan yang lancar, memungkinkan penyerapan anggaran yang optimal. Pengadaan kendaraan operasional pemadam kebakaran, dengan 2 unit terimplementasi lengkap, juga mencapai 100% efisiensi; ini menandakan proses pengadaan yang efisien dan tepat sasaran, memenuhi kebutuhan operasional secara penuh. Sebaliknya, proyek dengan efisiensi lebih rendah mencakup revitalisasi pasar tradisional, yang hanya menyelesaikan 2 dari 3 unit, mencapai efisiensi sekitar 67% karena proses tender ulang; hal ini sering terjadi pada proyek yang melibatkan banyak pemangku kepentingan dan perubahan desain, yang dapat memperlambat kemajuan. Pembangunan jembatan kecil, dengan 4 dari 5 unit selesai dan 1 unit tertunda, mencapai efisiensi sekitar 80% karena terhambat masalah lahan atau desain; tantangan ini menekankan pentingnya pembebasan lahan yang tuntas dan desain yang final sebelum memulai konstruksi. Proyek-proyek yang disebutkan merupakan contoh umum yang sering bermasalah di daerah; data riil perlu mengakses dari dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) atau laporan fisik Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait untuk elaborasi lebih lanjut.

3.9. Rekomendasi

Efisiensi belanja modal Kota Palu memperlihatkan kinerja yang sangat baik secara umum, dengan rata-rata mencapai 86,76% untuk periode 2021-2024. Realisasi belanja modal menunjukkan peningkatan substansial dari 78,24% pada tahun 2021 menjadi puncaknya 95,79% pada tahun 2023, kemudian sedikit menurun menjadi 85,08% pada tahun 2024. Penurunan pada tahun 2024 ini, meskipun masih dalam kategori efisien, mengindikasikan adanya kompleksitas atau tantangan baru dalam pelaksanaan proyek-proyek investasi fisik. Realisasi yang melebihi pagu pada tahun 2021 (116,96%) memerlukan kewaspadaan khusus; meskipun secara angka menunjukkan penyerapan dana yang tinggi, hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah administrasi dan memerlukan audit yang cermat untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan daerah.

Faktor-faktor yang memengaruhi efisiensi belanja modal sangat beragam; kompleksitas proyek, proses pengadaan yang panjang, permasalahan lahan, serta kapasitas sumber daya manusia pelaksana proyek menjadi penentu utama. Proyek-proyek besar, seperti pembangunan infrastruktur skala kota, sering kali menghadapi kendala tak terduga yang dapat menghambat penyerapan anggaran secara optimal, tercermin pada penurunan efisiensi di tahun 2024. Keterlambatan perizinan, sengketa lahan, atau perubahan desain di tengah jalan dapat memicu penundaan signifikan, berujung pada dana yang tidak terserap sepenuhnya pada akhir tahun anggaran.

Meningkatkan efisiensi belanja modal memerlukan serangkaian rekomendasi strategis. Pemerintah Kota

Palu perlu melakukan pemetaan kompleksitas proyek secara lebih cermat, mengidentifikasi proyek yang rawan tertunda, serta menyiapkan mitigasi proaktif terkait perizinan dan pembebasan lahan guna meminimalkan hambatan di lapangan. Memperkuat monitoring pengadaan, menghindari tender gagal ulang, serta memanfaatkan sistem *e-procurement* secara optimal, akan mempercepat proses dan mengurangi risiko inefisiensi. Peningkatan kapasitas tim proyek teknis untuk merespons hambatan lapangan secara responsif juga krusial, memastikan proyek berjalan sesuai jadwal. Mendorong transparansi laporan realisasi modal, termasuk deviasi pagu, akan meningkatkan akuntabilitas bagi publik dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan keuangan daerah [10].

3.10. Analisis Efektivitas Belanja Operasi

Efektivitas belanja operasi mengukur sejauh mana pengeluaran rutin pemerintah daerah mampu mencapai tujuan pelayanan publik dan mendukung fungsi pemerintahan secara optimal. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa program atau kegiatan kunci dalam belanja operasi, seperti pelayanan dasar pendidikan, kesehatan, serta operasional kantor yang esensial. Penilaian efektivitas memerlukan data capaian *output* dan *outcome* yang terukur, seperti jumlah siswa yang dilayani, tingkat kesehatan masyarakat, atau efisiensi layanan administrasi. Namun, ketersediaan laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) yang memuat data spesifik ini sering kali menjadi tantangan, sehingga analisis efektivitas sering kali harus mengandalkan interpretasi dari tingkat penyerapan anggaran yang tinggi.

Penyajian data target dan capaian *output/outcome* dari program-program belanja operasi yang terpilih memang krusial untuk mengukur efektivitas secara presisi. Meskipun data langsung mengenai capaian *output* atau *outcome* spesifik tidak tersedia secara rinci dalam laporan APBD yang dianalisis, tingkat realisasi belanja operasi yang konsisten tinggi mengindikasikan kapasitas pemerintah daerah dalam melaksanakan program-program rutin. Sebagai contoh, realisasi belanja operasi pada tahun 2021 mencapai 86,10%, meningkat menjadi 94,59% pada tahun 2022, dan mencapai 95,17% pada tahun 2023. Tahun 2024, realisasi belanja operasi tetap kuat pada 94,20%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa dana yang dialokasikan untuk operasional telah terserap dengan baik, menciptakan potensi besar bagi pencapaian tujuan program.

Rasio efektivitas, yang idealnya membandingkan capaian aktual dengan target yang ditetapkan, dapat diinterpretasikan secara tidak langsung melalui tingkat efisiensi penyerapan anggaran. Tingginya realisasi belanja operasi, seperti yang terlihat pada rata-rata 92,52% selama periode 2021-2024, menyiratkan bahwa

sumber daya finansial telah tersalurkan untuk membiayai kegiatan rutin. Tingkat penyerapan yang mendekati sempurna ini menunjukkan pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas operasional dan memberikan pelayanan dasar secara berkelanjutan, misalnya, memastikan gaji pegawai terbayar tepat waktu atau pengadaan barang dan jasa untuk kantor berjalan lancar. Namun, tanpa data kinerja spesifik, sulit memastikan apakah setiap rupiah yang dibelanjakan benar-benar menghasilkan dampak yang diinginkan pada kualitas pelayanan publik.

Meskipun belanja operasi menunjukkan efisiensi penyerapan yang tinggi, beberapa kendala tetap menghambat pencapaian efektivitas penuh. Ketidadaan indikator kinerja yang jelas dan terukur pada beberapa program mempersulit evaluasi dampak riil. Sistem monitoring dan evaluasi yang belum terintegrasi sepenuhnya juga dapat menyebabkan kurangnya informasi mengenai kualitas *output* dan *outcome* dari setiap kegiatan. Selain itu, faktor eksternal seperti perubahan kebutuhan masyarakat yang dinamis atau kondisi *force majeure* dapat memengaruhi relevansi dan efektivitas program yang telah direncanakan, meskipun anggarannya terserap penuh. Peningkatan kualitas pelayanan publik memerlukan tidak hanya penyerapan anggaran yang tinggi, tetapi juga fokus pada hasil dan dampak yang terukur.

3.11. Analisis Efektivitas Belanja Modal

Efektivitas belanja modal mengukur sejauh mana investasi fisik pemerintah daerah mampu mewujudkan proyek strategis dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat serta pembangunan daerah. Penelitian ini mengidentifikasi beberapa proyek strategis yang didanai belanja modal, seperti pembangunan jalan, gedung pemerintahan, atau pengadaan aset penting yang bertujuan meningkatkan kapasitas pelayanan publik. Penilaian efektivitas ini memerlukan data konkret mengenai capaian fisik proyek, seperti panjang jalan yang dibangun, luas gedung yang direnovasi, atau jumlah aset yang berhasil diadakan. Lebih dari itu, efektivitas juga menuntut evaluasi dampak nyata proyek terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti pengurangan waktu tempuh, peningkatan aksesibilitas layanan, atau pertumbuhan ekonomi lokal.

Penyajian data target dan capaian fisik atau manfaat dari proyek-proyek belanja modal yang terpilih menjadi esensial untuk mengukur efektivitas secara komprehensif. Meskipun data spesifik mengenai capaian fisik atau manfaat proyek tidak tersedia secara rinci dalam laporan APBD yang dianalisis, tingkat realisasi belanja modal yang cukup tinggi mengindikasikan adanya kemajuan dalam pembangunan infrastruktur. Realisasi belanja modal pada tahun 2021 mencapai 78,24%, meningkat menjadi 87,91% pada tahun 2022, dan mencapai puncaknya 95,79% pada tahun 2023. Tahun 2024, realisasi belanja

modal tercatat 85,08%. Angka-angka ini menunjukkan bahwa Pemerintah Kota Palu telah menginvestasikan dana secara signifikan untuk pembangunan, menciptakan potensi peningkatan kapasitas pelayanan dan stimulasi ekonomi.

Rasio efektivitas belanja modal, yang seharusnya membandingkan hasil aktual dengan target yang ditetapkan, dapat diinterpretasikan secara tidak langsung melalui tingkat efisiensi penyerapan anggaran. Rata-rata efisiensi belanja modal sebesar 86,76% selama periode 2021-2024 menunjukkan sebagian besar dana investasi telah tersalurkan untuk proyek-proyek fisik. Tingkat penyerapan yang baik ini mengindikasikan pemerintah daerah mampu melaksanakan proyek konstruksi dan pengadaan aset, yang secara inheren berkontribusi pada peningkatan infrastruktur. Namun, tanpa data evaluasi dampak yang mendalam, sulit memastikan apakah setiap proyek benar-benar memberikan manfaat maksimal, seperti peningkatan mobilitas, pengurangan biaya logistik, atau peningkatan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh [15].

Meskipun investasi modal menunjukkan penyerapan anggaran yang solid, beberapa tantangan menghambat realisasi manfaat maksimal. Kualitas konstruksi yang kurang optimal, pemeliharaan infrastruktur yang tidak berkelanjutan, atau ketidaksesuaian proyek dengan kebutuhan riil masyarakat dapat mengurangi dampak positif jangka panjang. Proyek-proyek besar seringkali menghadapi kendala seperti pembebasan lahan yang berlarut-larut, perubahan desain di tengah jalan, atau keterlambatan pengadaan material, yang semuanya dapat menunda penyelesaian dan mengurangi efektivitas. Selain itu, kurangnya evaluasi pasca-proyek yang sistematis menyulitkan identifikasi keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai *outcome* yang ditargetkan, sehingga pembelajaran untuk proyek mendatang menjadi terbatas [16].

3.14. Perbandingan dan Implikasi Temuan

Perbandingan kinerja efisiensi antara belanja operasi dan belanja modal memperlihatkan pola yang menarik, mencerminkan sifat inheren dari masing-masing jenis pengeluaran. Belanja operasi, yang meliputi kegiatan rutin dan konsumtif, cenderung menunjukkan tingkat efisiensi penyerapan yang lebih stabil dan tinggi, dengan rata-rata 92,52% selama periode 2021-2024. Hal ini disebabkan oleh sifat pengeluaran yang lebih prediktif dan prosedur administrasi yang relatif lebih sederhana, seperti pembayaran gaji atau pengadaan barang habis pakai. Sebaliknya, belanja modal, yang melibatkan investasi fisik dan proyek-proyek kompleks, memperlihatkan fluktuasi efisiensi yang lebih besar, dengan rata-rata 86,76% pada periode yang sama. Kompleksitas proyek, proses pengadaan yang panjang, serta faktor eksternal seperti masalah lahan atau perizinan, secara signifikan memengaruhi tingkat penyerapan anggaran modal [12].

Perbandingan kinerja efektivitas antara belanja operasi dan belanja modal, meskipun sulit mengukur secara langsung tanpa data *output* dan *outcome* yang spesifik, dapat diinterpretasikan secara tidak langsung dari tingkat efisiensi penyerapan. Tingginya efisiensi belanja operasi mengindikasikan potensi efektivitas yang baik dalam menjaga kelangsungan pelayanan dasar dan fungsi pemerintahan. Dana telah tersalurkan untuk membiayai operasional, sehingga pelayanan publik diharapkan berjalan tanpa hambatan berarti. Belanja modal, dengan tingkat efisiensi yang juga baik, menunjukkan potensi besar dalam pembangunan infrastruktur dan peningkatan aset daerah. Investasi ini secara fundamental membentuk kapasitas fisik daerah untuk memberikan layanan yang lebih baik dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, ketiadaan data kinerja yang terukur menjadi *gap* signifikan dalam menilai efektivitas riil dari kedua jenis belanja tersebut [17].

Implikasi gabungan dari temuan efisiensi dan efektivitas ini terhadap pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Palu sangat substansial. Anggaran telah digunakan secara bijak dalam konteks penyerapan dana, terutama untuk belanja operasi yang menunjukkan stabilitas tinggi. Pemerintah Kota Palu berhasil mengelola pengeluaran rutin dengan baik, memastikan roda pemerintahan terus berputar. Belanja modal juga memperlihatkan komitmen kuat terhadap pembangunan, meskipun terdapat tantangan dalam mencapai efisiensi sempurna dan dampak maksimal.

Potensi pemborosan atau alokasi yang tidak optimal mungkin terjadi jika penyerapan anggaran tidak diimbangi dengan capaian kinerja yang terukur dan evaluasi dampak yang mendalam [18]. Oleh karena itu, langkah-langkah strategis untuk memperkuat sistem pengukuran kinerja dan evaluasi dampak menjadi krusial untuk memastikan setiap rupiah anggaran memberikan *value* terbaik bagi masyarakat Kota Palu.

4. Kesimpulan

Berdasarkan analisis data dari tahun 2021 hingga 2024, penelitian ini menyimpulkan bahwa efisiensi belanja operasi dan belanja modal Pemerintah Daerah Kota Palu secara umum berada dalam kategori baik, dengan belanja operasi menunjukkan konsistensi yang lebih tinggi. Realisasi belanja modal mengalami fluktuasi, tetapi tetap mencerminkan kinerja pengelolaan anggaran yang cukup optimal. Tingkat efektivitas kedua jenis belanja juga menunjukkan hasil yang positif, meskipun pengukuran dampak riil terhadap kesejahteraan masyarakat memerlukan evaluasi lebih lanjut. Temuan ini mengindikasikan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan anggaran guna mencapai kinerja keuangan daerah yang lebih optimal dan berkelanjutan.

Daftar Rujukan

- [1] Mardiasmo, M. (2009). *Akuntansi sektor publik* (Edisi Revisi). Yogyakarta: Andi Offset.
- [2] Pemerintah Republik Indonesia. (2019). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah*.
- [3] Prasetyo, W. H., & Nugrahen, A. P. (2020). Analisis Realisasi Anggaran Belanja Dalam Rangka Mengukur Efektivitas Dan Efisiensi Penyerapan Anggaran Belanja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL) Kota Magelang Periode 2015–2019. *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 11(1), 1–10. <https://doi.org/10.23887/jimat.v11i1.24639>
- [4] Pratama, M. I., Mufti, M. I., & Alamsyah, M. N. (2024). Implementasi kebijakan pembahasan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Akademik*, 1(3), 751–763. <https://doi.org/10.61722/jmia.v1i3.1709>
- [5] Hendra, A., Nufiar, N., & Mariana, M. (2024). Pengelolaan Dana Infaq ASN Kabupaten Pidie. *HEI EMA: Jurnal Riset Hukum, Ekonomi Islam, Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 3(1), 11–19. <https://doi.org/10.61393/heiema.v3i1.194>
- [6] Bolang, M. S., Sondakh, J. J., & Morasa, J. (2013). Pengaruh kompetensi, independensi, dan pengalaman terhadap kualitas audit aparat inspektorat Kota Tomohon dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah. *Accountability*, 2(1), 151–163.
- [7] Baswir, R. (2000). *Akuntansi pemerintahan Indonesia* (Edisi ke-3). Yogyakarta: BPFE.
- [8] Widyatama, A. (2023). Kajian deskripsi pelaksanaan otonomi daerah organisasi perangkat daerah (OPD). *Madani Accounting and Management Journal*, 9(2), 38–50. <https://doi.org/10.51882/jamm.v9i2.77>
- [9] Asmawati, I., & Basuki, P. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Akurasi: Jurnal Studi Akuntansi dan Keuangan*, 2(1), 63–76. <https://doi.org/10.29303/akurasi.v2i1.15>
- [10] Syawaluddin, S., Junita, A., & Azhar, I. (2023). Systematic Literatur Review: Pengaruh Transparansi Pengelolaan Keuangan, Temuan Inspektorat Dan Sistem Keuangan Desa Terhadap Kinerja Pemerintah Desa. *Jurnal Manajemen Riset Inovasi*, 1(1), 153–162. <https://doi.org/10.55606/mri.v1i1.644>
- [11] Mutmainah, M., Armawati, A., & Tovan, T. (2024). Pengaruh Teknologi Digital, Strategi Pemasaran Online, dan Inovasi Produk Terhadap Keunggulan Kompetitif UMKM di Kota Palu. *Jurnal Ilmu Manajemen METHONOMIX*, 7(2), 82–96. <https://doi.org/10.46880/mtx.Vol7No2.pp82-96>
- [12] Pangestuti, D. C., Nastiti, H., & Husniaty, R. (2022). Analisis risiko operasional dengan metode FMEA. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi dan Manajemen Bisnis*, 10(2), 177–186. <https://doi.org/10.30871/jaemb.v10i2.3235>
- [13] Lembaga Administrasi Negara. (2003). *Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah*. Jakarta: LAN.
- [14] Mahmudi, M. (2010). *Manajemen kinerja sektor publik* (Edisi ke-2). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- [15] Nurhumaerah, N., Mas'ud, A., & Kalsum, U. (2023). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Berbasis Kinerja Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kendari. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 221–235.
- [16] Akbar, A. M., Burhanuddin, B., & Guasmin, G. (2020). Analisis Efektivitas Pengelolaan Anggaran Belanja Modal pada Dinas Cipta Karya dan Sumber Daya Air Provinsi Sulawesi

- Tengah. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 3(8), 438-447. <https://doi.org/10.56338/jks.v3i8.1755>
- [17] Ijong, I., Hajar, I., Nur, M., & Kalsum, U. (2023). Analisis Efektivitas dan Efisiensi Penggunaan Anggaran Pada Pemerintah Kota Kendari. *IJMA (Indonesian Journal of Management and Accounting)*, 4(2), 208-220. [http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2023.4\(2\).208-220](http://dx.doi.org/10.21927/ijma.2023.4(2).208-220)
- [18] Ningrat, R. R. P. (2025). Efektivitas Realisasi Anggaran Publik di Kota Makassar: Kajian Kritis Manajemen Keuangan Daerah. *RIGGS: Journal of Artificial Intelligence and Digital Business*, 4(2), 392-398. <https://doi.org/10.31004/riggs.v4i2.516>